

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015;
- Ahmad Muhid Estiyanto, Penegakan Sanksi Disiplin Berat Terhadap Pegawai Negara Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, *Iblam Law Review Volume 4, Nomor 2*, 2024;
- Amiruddin, et.al, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016;
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016;
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Adminitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Cetakan Ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2004;
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021;
- H.A. Syamsul Mulhayat, Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, cetakan Pertama, Adab, Indramayu, 2023;
- H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsian Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2020;
- Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cetakan pertama, CV. Lanundy Alifatama, Lampung, 2021;
- M. Ridho Saputra, Pelaksanaan Perceraian bagi Aparatur Negara (ASN) di Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Skripsi, Muaro Jambi, 2023;
- M. Nurul Irfan, Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011;

Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2014;

Ni'matul huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, Yogyakarta : UII Press, 2010;

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2018;

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hkum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;

Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan ketujuh, Gajah, Yogyakarta, 2019;

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

B. Jurnal/Penelitian/Majalah Ilmiah

Adia ferizko, Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penentuan Mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan *Structural*, *Universitas Lancang Kuning Jalan Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru*;

Adi Riyanto, Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019;

Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1* Juni 2018;

Ayunda Puspita, Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Disiplin Berat (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung), *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2014;

Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1*, Februari 2015;

Indri Hadisiswati , Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, *Jurnal Ahkam, Volume 2, Nomor 1*, Juli 2014;

Immanuela K. D. P.Tumilantouw & Dkk, "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol 13. No 4* Juli 2024;

- Lakoni, Rekontruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Kelurga Islam Di Indonesia, *Disertasi, Program Doktor Hukum Kelurga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023;
- Irma Yuningsih, Akibat Hukum Poligami Oleh PNS Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, *Jurnal Recgtscientia Hukum*, vol. 3, No. 1, 2023;
- Kholil Arkham Hakim, Analisis Yuridis Terhadap Hukum Nikah Siri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *Jurnal Rechtsvinding – (Pusat Analisis Hukum Nasional, Bphn)*;
- Kukuh Sumandarto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila”, *Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2*, Oktober 2022;
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 2* Desember 2018;
- Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1*, Agustus 2014;
- Rivaldi Nugraha, Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia, *Jurnal de Jure Volume 12 Nomor 2*, 1 Oktober 2020;
- Siti Latifah, “Analisis Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa”, *Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023;
- Tedi Sudrajat, Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian Fakultas Hukum Univesitas Jenderal Soedriman Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, No. 3* September, 2008;
- Yusnidar, Et Al, “Harmonisasi Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Antara Peraturan Perundang-Undangan Dosen Dengan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Vol. 7, No. 2*, April 2019;

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia . Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pembukaan. Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959;

.....,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1;

.....,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;

.....,Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176;

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250;

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

.....,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142;

.....,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718;

....., Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1172/KEP.GUB/BKD-5.3/2021 tentang Pengaturan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berisial SORAIYAH.

D. Internet

<file:///C:/Users/Owner/Downloads/843ed945022161845d5c7dd49f09b794.pdf>, diakses pada tanggal 07 Desember 2023;

<http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023;

Vicko Pratama Yudda, “Tindakan-Tindakan Pemerintah, Universitas Ekasakti Padang, 2020”, diakses Pada Tanggal 14 Desember 2023,
<File:///C:/Users/Owner/Downloads/Tugas%20han%20vicko.Pdf>;

Syaiful Anam & Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan (statute Approach) dalam penelitian Hukum, *legal opinion*, 2017, <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> di akses pada tanggal 4 September 2023;

Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1749/5/151801067_file%205.pdf diakses pada tanggal 13 Agustus 2024;

<https://bkpsdm.karimunkab.go.id/perkawinan-dan-perceraian/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2024;